

**TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL  
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK MELINDUNGI  
KEPENTINGAN ANGGOTA DARI WANPRESTASI**

**TESIS**

**Oleh:**

**BRIAN MARTIN  
NIM: 2102190093**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL KOPERASI  
SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN  
ANGGOTA DARI WANPRESTASI**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**BRIAN MARTIN  
NIM: 2102190093**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan

Nama : Brian Martin  
NIM : 21021900093  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugasakhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 November 2023

  
BRIAN MARTIN  
METERAI TEMPEL  
30FAKX595930550



## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA DARI WANPRESTASI

Oleh :

Nama : Brian Martin  
NIM : 21021900093  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 21 November 2023  
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.  
NIDN. 0327096504

Pembimbing II

Dr. Andrew betlehn., S.H., S.Kom., M.M., M.H.  
NIDN. 0331038704

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.  
NIDN. 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA  
NIDN: 0320116402



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 21 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Brian Martin  
NIM : 2102190093  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA DARI WANPRESTASI" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Andrew betlehn., S.H.,S.Kom.,M.M.,M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Abdul Ghoffar, S Pd., S.H., M.H	Sebagai Anggota	



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## PROGRAM PASCASARJANA

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brian Martin  
NIM : 2102190093  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENGAWAS  
EKSTERNAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK  
MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA DARI  
WANPRESTASI

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2023



Brian Martin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Untuk Melindungi Kepentingan Anggota Dari Wanprestasi”. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut, Penulis khususkan kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Ibu Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
3. Ibu Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan serta masukan yang bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing selaku Dosen Pembimbing yang juga memberikan arahan serta bimbingan yang bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya semasa Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
6. Bapak dan Ibu staf akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu proses administrasi dalam proses

penyelesaian tesis Penulis;

7. Istri penulis, dr. Dea Gratia Putri Sumbayak atas doa dan dukungannya kepada penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan maksimal;
8. Keluarga Penulis, Bapak St. Mariaman Purba, S.H., M.H. dan Mama St. Yuniwarti Saragih, S.E dan kakaku Nova Christina Purba S.H., M.H, serta kedua Mertua yang menopang dan memberikan dukungan serta doa agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
9. Rekan-rekan Penulis angkatan 2021 Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang bersama-sama dengan Penulis selama masa Perkuliahan; dan
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini berupa support moral yang sangat mendukung.

Penulis dengan penuh kesadaran dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu penulis berharap adanya kritikan dan saran yang sangat membangun untuk penyempurnaannya dan penulis berharap tesis ini berguna untuk praktisi perkoperasian, hakim, dan advokat.

Jakarta, 21 November 2023



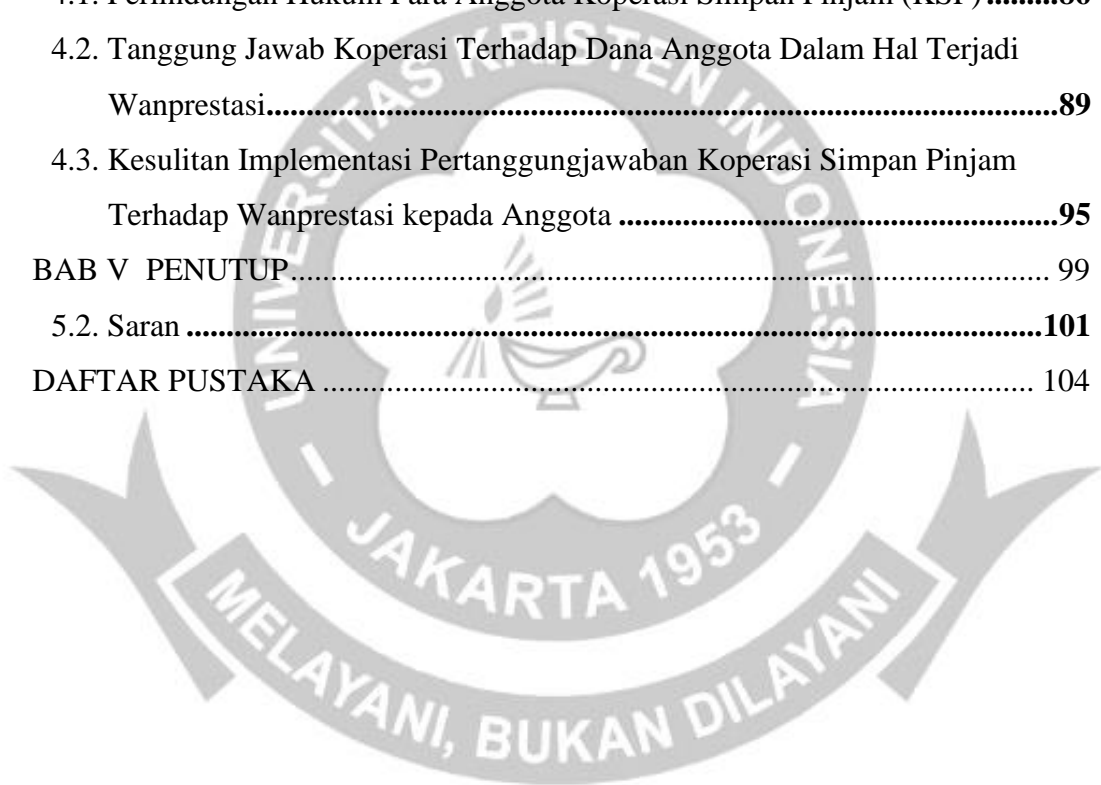
Brian Martin



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian .....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	11
1.4.1. Kerangka Teori.....	11
1.4.2. Kerangka Konsep .....	15
1.5. Metode Penelitian .....	17
1.6. Keaslian Penelitian .....	25
1.7. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1. Tinjauan Dasar Koperasi .....	28
2.2. Tinjauan Umum Wanprestasi .....	40
2.3. Landasan Teori .....	52
2.4. Landasan Hukum Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia yang Merupakan Negara Civil Law .....	59
BAB III PERAN PENGAWAS EKSTERNAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNTUK MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI .....	62
3.1. Peran Pengawas Eksternal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) .....	62

3.2. Peran Pengawasan Eksternal Serta Penindakan Oleh BI (Bank Indonesia) Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan dan otoritas jasa keuangan (OJK) Pada Koperasi yang menghimpun dana Masyarakat .....	<b>70</b>
3.3 Negara Maju mempunyai lembaga Khusus dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.....	<b>76</b>
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KSP.....</b>	
4.1. Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) .....	<b>86</b>
4.2. Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Dana Anggota Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.....	<b>89</b>
4.3. Kesulitan Implementasi Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Wanprestasi kepada Anggota .....	<b>95</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
5.2. Saran .....	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>104</b>



## ABSTRAK

Menciptakan suatu perekonomian mandiri bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan demokrasi ekonomi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang semakin mantap, perlu didorong oleh pelaku dalam tata perkembangan nasional. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi nasional dan perubahan yang terjadi lingkungan dunia usaha termasuk didalamnya adalah unit koperasi, Pada era sekarang ini koperasi memiliki perbedaan prinsip dengan pemikiran yang mendasari terbentuknya koperasi tersebut, pada saat ini koperasi dijadikan sebagai investasi deposito berjangka yang menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma serta aturan yang ada di Perkoperasian Indonesia. Perkembangan koperasi saat ini tidak didukung dengan fungsi pengawasannya baik secara internal maupun secara eksternal, yang menjadi fokus penulisan pada tesis ini adalah mengenai peran pengawas eksternal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap anggota KSP dan perlindungan hukum bagi para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh KSP.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi mengenai pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap para anggota Koperasi, Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif agar dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil penelitian pada penulisan ini Pemerintah pada prinsipnya telah berupaya untuk melakukan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam Peraturan untuk mengawasi koperasi ini sebenarnya sudah diatur dari tahun 1992 yaitu setelah lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai dengan tahun 2017 namun tidak ada kepastian hukum yang mengatur secara pasti mengenai pengawas eksternal untuk mengawasi kegiatan KSP dan dibutuhkannya pengawas eksternal untuk mengawasi koperasi yang tidak terbatas pada anggota koperasi.

**Kata kunci : Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Wanprestasi**

## ABSTRACT

Creating a joint independent economy based on the principle of kinship, economic democracy, the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 with an increase in people's prosperity that is increasingly evenly distributed, high enough economic growth and increasingly steady national stability, needs to be encouraged by actors in the national development system. Cooperatives are people's economic movements that are managed using the principle of kinship and the principle of togetherness. Cooperatives aim to promote the welfare of members in particular and society in general, as well as participate in building the national economic order. The development of the national economy and changes that occur in the business world environment include cooperative units, In the current era cooperatives have different principles with the thinking underlying the formation of the cooperative, at this time cooperatives are used as time deposit investments which according to the author are not in accordance with the rules or norms and rules that exist in Indonesian Cooperatives. The development of cooperatives is currently not supported by its supervisory function both internally and externally, the focus of writing this thesis is on the role of external supervisors of Savings and Loan Cooperatives (KSP) to prevent defaults on KSP members and legal protection for members of Savings and Loan Cooperatives (KSP) who suffer losses due to defaults committed by KSP.

This research is a normative research, which is research sourced from secondary data. Secondary data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials that can provide information on supervision of savings and loan cooperatives to prevent defaults on cooperative members, These data are then analyzed and processed with qualitative methods in order to explain and provide solutions to the legal problems studied.

The results of research at this writing, the Government has in principle tried to supervise Savings and Loan Cooperatives The regulations to supervise these cooperatives have actually been regulated from 1992, namely after the birth of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives until 2017, but there is no definite legal certainty regarding external supervisors to supervise KSP activities and the need for external supervisors to supervise cooperatives that is not limited to cooperative members.

**Kata kunci : Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Wanprestasi**